

MATERI PENGABDIAN MASYARAKAT



**MODUL PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI TPQ DARUL
HIKMAH MELALUI MANAJEMEN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SYARIAH**

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
GENAP 2025-2026**

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Daftar Isi.....	2
Kata Pengantar.....	3
BAB 1: PENDAHULUAN & EKOSISTEM KOPERASI TPQ	4
1.1 Rasionalisasi Kebijakan & Latar Belakang	4
1.2 Visi Masa Depan dan Arah Strategis	4
1.3 Koperasi sebagai Jantung Ekonomi Ekosistem TPQ	5
BAB 2: LANDASAN SYARIAH & TIGA PILAR KOPERASI	6
2.1 Tiga Pilar Kekuatan Koperasi Syariah	6
2.2 Penerapan Akad Syariah dalam Realitas TPQ	6
2.3 Kepatuhan Syariah & Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	7
BAB 3: MANAJEMEN OPERASIONAL BERBASIS POAC	8
3.1 Konsep POAC dalam Perspektif Syariah	8
3.2 Mesin Penggerak Organisasi Koperasi	8
3.3 Empat Kapasitas SDM Esensial (Man Behind the Gun)	9
BAB 4: TRANSFORMASI DIGITAL & SISTEM INFORMASI SYARIAH	10
4.1 Urgensi Transformasi Digital Koperasi	10
4.2 Analisis Efisiensi: Metode Manual vs Digital	10
4.3 Arsitektur Sistem Informasi Koperasi	11
BAB 5: PETA JALAN STRATEGIS & EKSPOSE EVALUASI	12
5.1 Sinergi Menuju Pertumbuhan Eksponensial	13
5.2 Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Koperasi (Tahap 1 - 4)	13
5.3 Sesi Diskusi, Q&A, dan Evaluasi Program	13
Materi Tambahan Pelaporan keuangan.....	14
Daftar Pustaka.....	23

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga modul yang berjudul "Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi TPQ Darul Hikmah melalui Manajemen dan teknologi informasi syariah " ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Modul ini disusun sebagai salah satu media pembelajaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan para anggota koperasi dalam mengelola secara efektif, dan berbasis digital. Materi yang disajikan dalam modul ini mencakup konsep dasar manajemen pengelolaan keuangan koperasi, pemanfaatan teknologi digital syariah dalam pelaporan keuangan, sehingga diharapkan dapat membantu peserta pelatihan dalam memahami dan mengimplementasikan materi dalam praktik sehari-hari.

Penyusun menyadari bahwa modul ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan modul ini di masa yang akan datang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta pelatihan, khususnya Koperasi TPQ Darul Hikmah, serta menjadi salah satu upaya dalam mendukung peningkatan kapasitas di bidang tata kelola (management) usaha khususnya bagi anggota koperasi TPQ Darul Hikmah. Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyusunan modul ini.

Hormat Kami,

Penyusun

MATERI PELATIHAN

PENDAHULUAN & EKOSISTEM KOPERASI TPQ

1.1 Rasionalisasi Kebijakan & Latar Belakang

1. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) merupakan institusi pendidikan non-formal yang memegang peranan strategis dalam pembentukan karakter, moral, dan literasi Al-Qur'an generasi muda Muslim. Namun, dalam realitas operasionalnya, mayoritas TPQ menghadapi tantangan klasik berupa keterbatasan sumber daya finansial, ketergantungan pada infak/spp santri yang fluktuatif, serta kesejahteraan para ustadz/ustadzah yang masih memerlukan perhatian serius. Kondisi ini menuntut adanya sebuah entitas pendukung yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi secara terstruktur dan berkelanjutan.
2. Koperasi TPQ Darul Hikmah hadir sebagai solusi atas tantangan tersebut. Didirikan atas semangat gotong royong dan nilai-nilai Islam, koperasi ini bertujuan untuk mentransformasi potensi ekonomi komunitas TPQ—yang meliputi ustadz, staf pengajar, santri, dan wali santri—menjadi kekuatan ekonomi yang solid. Dalam perjalanannya, dinamika perkembangan teknologi dan tuntutan tata kelola modern mengharuskan koperasi untuk tidak lagi dikelola secara tradisional, melainkan melalui harmonisasi antara manajemen profesional dan Teknologi Informasi (TI) Syariah. Menyiapkan bukti transaksi

1.2 Visi Masa Depan dan Arah Strategis

Untuk memberikan arah pengembangan yang jelas dan terukur, Koperasi TPQ Darul Hikmah menetapkan visi jangka panjang yang menjadi fondasi seluruh aktivitas operasional dan pengembangan usahanya. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi Koperasi TPQ Percontohan yang Mandiri, Amanah, dan Berdaya Saing melalui Teknologi Informasi Syariah yang Unggul untuk Mewujudkan Kesejahteraan Ekosistem Darul Hikmah, Hari Ini dan untuk Generasi Mendatang.”

Pencapaian visi ini ditopang oleh empat pilar arah strategis utama:

- Penguatan Kemandirian Financial Yayasan: Membangun unit usaha produktif

yang mampu menyumbang pendapatan berkelanjutan bagi operasional TPQ.

- **Peningkatan Kesejahteraan Staf Pengajar:** Menyediakan fasilitas pembiayaan syariah, simpanan, dan pembagian SHU yang adil bagi ustadz dan ustadzah.
- **Digitalisasi Layanan Keuangan:** Mengintegrasikan seluruh transaksi ke dalam platform digital berbasis cloud dan aplikasi seluler yang transparan.
- **Standardisasi Kepatuhan Syariah:** Memastikan seluruh instrumen transaksi dan pengelolaan dana terbebas dari riba, gharar, dan maysir sesuai fatwa DSN-MUI.

1.3 Koperasi sebagai Jantung Ekonomi Ekosistem TPQ

Ekosistem Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan: Yayasan, Pengelola TPQ, Tenaga Pendidik, Santri, dan Wali Santri. Koperasi TPQ Darul Hikmah memosisikan diri sebagai 'Jantung Ekonomi' yang mengalirkan manfaat finansial ke seluruh jaringan ekosistem tersebut.

Komponen Ekosistem	Peran Koperasi Syariah	Dampak & Manfaat Utama
Santri & Wali Santri	Layanan kebutuhan harian (seragam, kitab, ATK) & tabungan pendidikan.	Kemudahan bertransaksi, kepastian harga transparan, dan jaminan dana aman.
Staf Pengajar (Guru)	Akses pembiayaan syariah tanpa riba & tabungan hari raya/pensiun.	Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan finansial keluarga.
Yayasan / TPQ	Pemberdayaan kemandirian ekonomi jangka panjang.	Ketergantungan dana luar berkurang, operasional pendidikan lebih stabil.

BAB 2: LANDASAN SYARIAH & TIGA PILAR KOPERASI

2.1 Tiga Pilar Kekuatan Koperasi Syariah

Keberhasilan Koperasi TPQ Darul Hikmah didasarkan pada tiga pilar utama yang menyatukan antara keagungan ajaran Islam dan rasionalitas manajemen modern. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Ta'awun (Kebaikan Bersama): Prinsip tolong-menolong antar anggota dalam kerangka kebaikan dan ketakwaan. Koperasi bukan hanya wadah komersial, melainkan sarana memperkuat ukhuwah islamiyah dan saling membantu beban ekonomi sesama anggota.
2. Adalah (Keadilan Rasional): Keadilan mutlak dalam pembagian hasil usaha (SHU), penetapan margin, serta perlakuan setara terhadap seluruh anggota tanpa diskriminasi. Prinsip ini melarang adanya praktik penindasan finansial atau eksploitasi.
3. Transparansi (Menjaga Amanah): Keterbukaan informasi keuangan dan operasional secara mutlak yang sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai syariat. Transparansi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan (tsiqah) publik dan anggota.

2.2 Penerapan Akad Syariah dalam Realitas TPQ

Operasional Koperasi TPQ Darul Hikmah didasarkan pada akad-akad Fiqh Muamalah yang valid dan telah disesuaikan dengan kebutuhan harian ekosistem pendidikan Al-Qur'an. Berikut adalah pemetaan kebutuhan harian dengan akad syariah yang diterapkan:

Kebutuhan Operasional	Skema Akad Syariah	Deskripsi Mekanisme	Solusi & Manfaat Real
Pengadaan seragam, kitab, & ATK santri.	Murabahah	Jual beli barang dengan menegaskan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati.	Barang tersedia cepat, margin transparan, pembayaran fleksibel.
Persiapan finansial hari raya / pendidikan.	Mudharabah	Kerjasama modal usaha di mana koperasi mengelola dana dan keuntungan dibagi sesuai nisbah.	Dana berkembang produktif, bagi hasil adil dan bebas riba.
Simpanan kurban atau operasional TPQ.	Wadiah	Titipan murni dana anggota yang aman dan dapat ditarik sewaktu-waktu.	Keamanan dana terjamin 100%, kemudahan likuiditas operasional.

2.3 Kepatuhan Syariah & Peran DPS

Kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan mahkota utama dari Koperasi TPQ Darul Hikmah. Tanpa kepatuhan syariah yang ketat, koperasi akan kehilangan esensi keilahuannya dan tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan krusial untuk mengawasi, mendampingi, dan memastikan seluruh SOP serta produk keuangan koperasi selalu berpegang teguh pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Tugas utama DPS dalam ekosistem koperasi meliputi: (1) Menilai dan menyetujui produk pembiayaan baru, (2) Melakukan audit syariah berkala terhadap pelaksanaan transaksi di lapangan, (3) Memberikan petunjuk dan nasihat Fiqh Muamalah kepada pengurus dan pengelola, serta (4) Mengawasi penanganan dana sosial (ZISWAF) agar tersalurkan tepat sasaran.

BAB 3: MANAJEMEN OPERASIONAL BERBASIS POAC

3.1 Konsep POAC dalam Perspektif Syariah

Manajemen modern mengenal prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) sebagai standar tata kelola organisasi. Dalam Koperasi TPQ Darul Hikmah, fungsi-fungsi POAC ini diintegrasikan dengan niat dan prinsip syariah untuk menjembatani cita-cita luhur Islam dengan eksekusi operasional yang profesional.

Planning (Perencanaan): Menentukan visi, misi, target keuangan, dan strategi pertumbuhan koperasi yang terarah. Perencanaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential) dan kalkulasi risiko berbasis syariah.

Organizing (Pengorganisasian): Penataan struktur pengurus yang rapi, pembagian wewenang yang jelas (job description), dan pemisahan fungsi audit untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest).

Actuating (Penggerakan): Mendorong pengurus dan staf untuk bekerja dengan semangat ibadah (itqan dan ihsan), memberikan kepemimpinan yang teladan, serta mengoptimalkan layanan kepada anggota.

Controlling (Pengawasan): Audit keuangan presisi, pengawasan kepatuhan syariah berlapis, dan evaluasi indikator kinerja utama (KPI) secara rutin.

3.2 Mesin Penggerak Organisasi Koperasi

Koperasi TPQ Darul Hikmah bergerak melalui mekanisme tata kelola organ koperasi yang saling mendukung. Struktur penggerak organisasi ini dapat diilustrasikan sebagai sistem roda gigi yang bekerja secara harmonis:

- **Rapat Anggota Tahunan (RAT):** Pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. RAT menetapkan kebijakan umum, murni kepemilikan anggota, serta memberikan persetujuan laporan pertanggungjawaban strategis.
- **Pengurus & Pengelola:** Eksekutif harian yang menjalankan operasional, manajemen keuangan, dan bisnis koperasi secara profesional.
- **Unit Usaha Operasional:** Eksekusi lapangan yang terbagi ke dalam unit Simpan Pinjam

Syariah, Toko/Kantin TPQ, dan Jasa Keuangan/Pelatihan.

3.3 Empat Kapasitas SDM Esensial (Man Behind the Gun)

Sebagus apa pun sistem atau teknologi yang digunakan, faktor penentu utama keberhasilan (critical success factor) tetap terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (Man Behind the Gun). Pengelola koperasi wajib memiliki empat kapasitas esensial:

1. Literasi Syariah (Spiritual) Pendalaman Fiqh Muamalah, pemahaman akad, dan kesadaran menjaga amanah keagamaan bagi pengawas dan pengurus.	2. Literasi Digital (Teknikal) Keahlian pengoperasian software core banking koperasi, manajemen data cloud, dan pemahaman keamanan siber dasar.
3. Layanan Prima (Sosial) Kemampuan komunikasi yang efektif, ramah, dan empatik dalam melayani kebutuhan wali santri dan anggota.	4. Manajemen Risiko (Analitikal) Kapasitas memitigasi pembiayaan bermasalah, analisis kelayakan anggota, dan pengelolaan fluktuasi pasar.

BAB 4: TRANSFORMASI DIGITAL & SISTEM INFORMASI SYARIAH

4.1 Urgensi Transformasi Digital Koperasi

Beralih dari pencatatan manual ke sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi bukan lagi sekadar pilihan tentatif, melainkan suatu kebutuhan mendesak bagi Koperasi TPQ Darul Hikmah. Pengelolaan tradisional yang mengandalkan buku fisik atau spreadsheet terpisah terbukti memiliki banyak kelemahan, seperti risiko kehilangan data, keterlambatan pelaporan, hingga potensi human error yang tinggi.

Dengan mentransformasikan operasional ke sistem digital, koperasi memperoleh tiga manfaat utama: (1) Kecepatan transaksi yang memotong waktu tunggu anggota, (2) Keamanan data simpanan dan pembiayaan terjamin melalui enkripsi cloud, dan (3) Pelaporan keuangan real-time yang siap diaudit kapan saja.

4.2 Analisis Efisiensi: Metode Manual vs Digital

Evaluasi perbandingan antara tata kelola manual dan tata kelola modern berbasis digital menunjukkan lompatan performa yang sangat signifikan:

Indikator Evaluasi	Metode Manual (Lama)	Metode Digital Syariah (Modern)
Pencatatan & Data	Buku besar fisik & file Excel terpisah. Risiko kehilangan/kerusakan data sangat tinggi.	Sistem Cloud terintegrasi dengan backup harian otomatis dan keamanan terenkripsi.
Kualitas Layanan	Antrean panjang di kantor koperasi, rentan kesalahan input data manusia (human error).	Transaksi instan via Mobile Apps / Web interface. Akurasi data mencapai 100%.
Transparansi & Audit	Rekapitulasi dan proses audit keuangan memakan waktu berminggu-minggu.	Laporan keuangan real-time. Audit instan kapan pun diperlukan (Data-Driven Decision).
Kecepatan Transaksi	Memerlukan waktu rata-rata 15 Menit per verifikasi berkas.	Terverifikasi otomatis dalam 10 Detik secara real-time (Akselerasi 90%+).

4.3 Arsitektur Sistem Informasi Koperasi

Arsitektur Teknologi Informasi pada Koperasi TPQ Darul Hikmah dirancang modular dan saling terhubung (interconnected) yang terdiri dari tiga komponen utama:

1. Core System (Back-End Database): Database pusat terenkripsi yang mengelola seluruh transaksi simpanan, pembiayaan, data keanggotaan, dan akuntansi secara aman.
2. Mobile Member Apps (Front-End Anggota): Aplikasi seluler di genggam tangan wali santri dan anggota untuk mengecek saldo simpanan, memantau riwayat cicilan, serta melakukan pembayaran secara daring.
3. Auto Reporting Module (Dashboard Manajemen): Modul terotomatisasi yang menghasilkan Laporan Laba/Rugi, Neraca, dan Pembagian SHU secara presisi setiap akhir bulan.

BAB 5: PETA JALAN STRATEGIS & EKSPOSE EVALUASI

5.1 Sinergi Menuju Pertumbuhan Eksponensial

Peningkatan kapasitas Koperasi TPQ Darul Hikmah tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan satu aspek. Pertumbuhan aset yang berkelanjutan dan eksponensial memerlukan sinergi mutlak antara tiga pilar pendukung:

[Prinsip Syariah (Ruh & Keberkahan)] + [Manajemen POAC (Otak & Struktur)] + [IT Digital (Otot & Kecepatan)]

= PERTUMBUHAN ASET BERKELANJUTAN (TAHUN 1 HINGGA 4+)

Teknologi tanpa syariah akan kehilangan arah keberkahan, sedangkan syariah tanpa teknologi akan kehilangan efisiensi. Gabungan ketiganya menjamin proyeksi pertumbuhan aset dan jangkauan kemanfaatan yang terukur.

5.2 Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Koperasi

Transformasi Koperasi TPQ Darul Hikmah dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu empat tahap strategis:

Tahapan	Fokus Utama Transformation	Target Output Strategis
Tahap 1 (Fondasi)	Standarisasi SOP Syariah & Pelatihan Dasar Manajemen bagi Pengurus Inti.	SOP operasional baku tercetak, sertifikasi dasar pengurus, kelayakan sistem syariah.
Tahap 2 (Infrastruktur)	Implementasi Core Banking System & Digitalisasi/Migrasi Data Historis.	Database terpusat cloud aktif, migrasi data pembukuan manual selesai 100%.
Tahap 3 (Aksesibilitas)	Peluncuran Mobile Apps Terintegrasi untuk Seluruh Anggota & Wali Santri.	Seluruh anggota terhubung ke aplikasi seluler, transaksi daring berjalan lancar.
Tahap 4 (Akselerasi)	Evaluasi Kinerja Menyeluruh & Ekspansi Pembukaan Unit Usaha Baru.	Aset tumbuh eksponensial, pembukaan unit usaha ritel/jasa baru bagi ekosistem.

5.3 Sesi Diskusi, Q&A, dan Evaluasi Program

Sebagai penutup modul pelatihan ini, dilaksanakan Sesi Tanya Jawab (Q&A) dan Evaluasi Interaktif untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan. Diskusi diarahkan untuk membedah tantangan spesifik di lapangan serta menyusun rencana aksi nyata (action plan) implementasi transformasi digital syariah di Koperasi TPQ Darul Hikmah.

Materi Tambahan

2.2 Pentingnya Laporan Penganggaran

Laporan penganggaran memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan organisasi. Melalui laporan penganggaran, organisasi dapat mengetahui kebutuhan dana yang diperlukan serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keberadaan laporan penganggaran dapat membantu organisasi dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Misalnya, apabila terdapat keterbatasan dana, organisasi dapat menentukan prioritas kegiatan yang harus didahulukan. Sebaliknya, apabila tersedia dana yang cukup, organisasi dapat mengoptimalkan pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Selain itu, laporan penganggaran juga dapat meningkatkan disiplin dalam penggunaan dana. Setiap pengeluaran yang dilakukan harus mengacu pada rencana yang telah disusun sebelumnya sehingga risiko pemborosan dapat diminimalkan. Menurut Rudianto (2018), anggaran dapat menjadi alat komunikasi yang efektif karena seluruh pihak dalam organisasi memperoleh informasi yang sama mengenai target yang ingin dicapai dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, koordinasi antarbagian dapat berjalan dengan lebih baik.

Warren, Reeve, dan Duchac (2020) juga menjelaskan bahwa proses penganggaran memungkinkan organisasi untuk mempersiapkan diri terhadap berbagai kondisi yang mungkin terjadi pada masa mendatang, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan terencana.

Penyusunan laporan penganggaran dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan. Salah satu tujuan utama penyusunan anggaran adalah memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi.

Menurut Mulyadi (2018), penyusunan anggaran bertujuan untuk membantu manajemen dalam merencanakan aktivitas, mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan, serta mengendalikan penggunaan sumber daya agar tetap sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan laporan penganggaran antara lain sebagai berikut. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

1. Membantu proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana.
2. Menentukan prioritas kegiatan sesuai kebutuhan organisasi.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
4. Menjadi alat pengendalian terhadap penggunaan anggaran.
5. Menjadi dasar evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2020) menyatakan bahwa anggaran dapat membantu organisasi menetapkan tujuan yang realistis serta mendorong seluruh anggota organisasi untuk berupaya mencapai tujuan tersebut secara efektif.

2.3 Fungsi Laporan Penganggaran

Laporan penganggaran memiliki beberapa fungsi utama dalam pengelolaan keuangan organisasi.

1. Fungsi perencanaan, anggaran digunakan untuk menentukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan beserta kebutuhan sumber daya yang diperlukan.
2. Fungsi pengendalian. Anggaran digunakan sebagai alat pembanding antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang memerlukan tindakan perbaikan.
3. Fungsi koordinasi. Proses penyusunan anggaran melibatkan berbagai pihak sehingga mampu menyelaraskan tujuan antarunit kerja.
4. Fungsi komunikasi. Anggaran menjadi media penyampaian sasaran organisasi kepada seluruh anggota.
5. Fungsi motivasi. Target-target yang tercantum dalam anggaran dapat mendorong individu untuk bekerja lebih optimal.
6. Fungsi evaluasi. Anggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Nordiawan dan Hertianti (2022) menyatakan bahwa anggaran merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan karena mampu menghubungkan tujuan organisasi dengan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan sering kali dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran yang dilakukan.

2.4 Prinsip Penyusunan Laporan Penganggaran

Penyusunan laporan penganggaran perlu memperhatikan beberapa prinsip agar anggaran yang dihasilkan dapat memberikan manfaat secara optimal.

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai rencana penggunaan dana.
2. Akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelola.
3. Efektivitas, yaitu kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Efisiensi, yaitu penggunaan dana secara hemat tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan.
5. Keadilan, yaitu pengalokasian sumber daya berdasarkan kebutuhan yang proporsional.
6. Kepatuhan, yaitu kesesuaian dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Nordiawan dan Hertianti (2022) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (good governance). Selain itu, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013) menegaskan bahwa akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan hanya dapat dicapai apabila organisasi memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan demikian, penyusunan anggaran tidak hanya berfokus pada aspek perencanaan, tetapi juga harus mempertimbangkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menyatakan bahwa informasi keuangan yang berkualitas harus relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut perlu diperhatikan dalam setiap proses penyusunan dan pelaporan anggaran.

2.5 Tahapan Penyusunan Laporan Penganggaran

Penyusunan laporan penganggaran merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan. Proses tersebut umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan.

1. Identifikasi kebutuhan.
2. Penetapan prioritas kegiatan.

3. Penyusunan rencana anggaran.
4. Pembahasan dan persetujuan.
5. Pelaksanaan anggaran.
6. Monitoring dan evaluasi.

Menurut Mulyadi (2018), keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan anggaran dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang telah direncanakan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif.

Warren et al. (2020) juga menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sangat penting karena dapat menjadi sumber informasi bagi penyusunan anggaran pada periode berikutnya.

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran

Penyusunan laporan penganggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya keuangan, kemampuan sumber daya manusia, struktur organisasi, serta prioritas program kerja. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Weygandt et al. (2020), organisasi perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut agar anggaran yang disusun bersifat realistis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

2.7 Manfaat Laporan Penganggaran

Laporan penganggaran memberikan berbagai manfaat bagi organisasi. Anggaran dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dana, mendukung proses pengambilan keputusan, mempermudah pengawasan, serta menjadi dasar evaluasi kinerja. Rudianto (2018) menjelaskan bahwa anggaran yang disusun secara sistematis dapat mengurangi risiko pemborosan karena setiap aktivitas telah memiliki batasan penggunaan biaya yang jelas.

Selain itu, Mulyadi (2018) menyatakan bahwa anggaran dapat meningkatkan koordinasi antarbagian karena seluruh pihak bekerja berdasarkan tujuan dan rencana yang sama. Dengan demikian, laporan penganggaran tidak hanya bermanfaat dari sisi

administrasi keuangan, tetapi juga mendukung efektivitas manajemen organisasi secara keseluruhan.

2.8 Permasalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan proses yang membutuhkan ketelitian, ketepatan, serta pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Dalam praktiknya, masih banyak organisasi yang menghadapi berbagai kendala dalam menyusun laporan keuangan secara baik dan benar. Permasalahan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal organisasi.

Menurut Rudianto (2018), salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Keterbatasan kompetensi tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam pengklasifikasian transaksi, pencatatan yang tidak lengkap, hingga penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya dokumentasi juga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Bukti transaksi yang tidak tersimpan dengan baik dapat menyulitkan proses verifikasi serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pelaporan.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Organisasi yang masih menggunakan sistem pencatatan manual cenderung membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pengolahan data dibandingkan organisasi yang telah memanfaatkan teknologi digital. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.

Warren, Reeve, dan Duchac (2020) menjelaskan bahwa keterlambatan penyampaian informasi keuangan dapat mengurangi relevansi informasi tersebut dalam mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi yang sesuai untuk mendukung proses pelaporan keuangan.

Adapun beberapa permasalahan yang umum ditemukan dalam penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Kurangnya pemahaman mengenai proses akuntansi.
2. Ketidaklengkapan dokumen pendukung transaksi.

3. Kesalahan dalam pengelompokan akun.
4. Keterlambatan pencatatan transaksi.
5. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Lemahnya sistem pengendalian internal.
7. Rendahnya koordinasi antarbagian.

Pemahaman terhadap berbagai permasalahan tersebut penting agar organisasi mampu menyusun strategi perbaikan yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

2.9 Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu indikator tata kelola organisasi yang baik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal oleh para pemangku kepentingan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), informasi keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Karakteristik tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna informasi.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang berkelanjutan akan membantu individu memahami perkembangan standar akuntansi, prosedur pelaporan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, organisasi perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai proses pencatatan dan pelaporan keuangan. SOP akan membantu menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas sehingga meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Mulyadi (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pengendalian serta menghasilkan informasi yang lebih akurat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem yang digunakan perlu dilakukan secara berkala.

Strategi lain yang dapat diterapkan antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
2. Menyusun prosedur kerja yang jelas.

3. Memanfaatkan teknologi informasi.
4. Memperkuat sistem pengendalian internal.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
6. Menjaga kelengkapan dokumen pendukung.
7. Meningkatkan koordinasi antarunit kerja.

Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, organisasi diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

2.10 Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan organisasi. Transparansi mengacu pada keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Nordawati dan Hertianti (2022) menjelaskan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi. Informasi keuangan yang disampaikan secara terbuka memungkinkan pihak terkait untuk memahami kondisi keuangan organisasi serta menilai efektivitas penggunaan dana.

Akuntabilitas juga berfungsi sebagai sarana pengendalian. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan melalui bukti transaksi yang memadai dan laporan yang disusun secara sistematis. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013) menegaskan bahwa pengendalian internal yang efektif menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas organisasi. Melalui sistem pengendalian yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa proses pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut.

1. Menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

2. Menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dipahami.
3. Menjaga keandalan data keuangan.
4. Menyimpan dokumen pendukung secara sistematis.
5. Melakukan audit atau pemeriksaan secara berkala.
6. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

Melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, organisasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan

2.9 Etika dalam Penyusunan dan Pelaporan Keuangan

Etika merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, etika memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan serta penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disusun tanpa memperhatikan prinsip etika berpotensi menghasilkan informasi yang menyesatkan dan merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, setiap individu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Mulyadi (2018), keandalan informasi keuangan sangat dipengaruhi oleh integritas individu yang terlibat dalam sistem akuntansi. Integritas mendorong seseorang untuk bertindak jujur, objektif, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya integritas, sistem pengendalian yang baik sekalipun tindakan mampu mencegah terjadinya penyimpangan secara optimal.

Etika dalam pelaporan keuangan juga berkaitan dengan penyampaian informasi secara transparan dan tidak manipulatif. Penyusun laporan keuangan harus menyajikan informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya, tidak melebih-lebihkan maupun mengurangi fakta yang ada. Informasi yang disajikan secara jujur akan membantu para pengguna laporan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Warren, Reeve, dan Duchac (2020) menjelaskan bahwa perilaku etis dalam bidang akuntansi sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap

informasi keuangan. Kepercayaan merupakan aset yang penting bagi setiap organisasi karena menjadi dasar terciptanya hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan.

Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan antara lain sebagai berikut.

1. Kejujuran, yaitu menyampaikan informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Integritas, yaitu menjunjung tinggi nilai moral dan konsisten dalam bertindak.
3. Objektivitas, yaitu menyusun laporan berdasarkan bukti dan data yang valid tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi.
4. Kerahasiaan, yaitu menjaga informasi yang bersifat sensitif agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
5. Kompetensi profesional, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas.
6. Tanggung jawab, yaitu bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan.

Nordiawan dan Hertianti (2022) menyatakan bahwa penerapan etika dalam pengelolaan keuangan akan mendukung terwujudnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi yang baik. Dengan demikian, etika tidak hanya menjadi pedoman perilaku individu, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang berkualitas.

Melalui penerapan prinsip-prinsip etika tersebut, organisasi diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya akurat dan tepat waktu, tetapi juga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani Press.
- Arifin, Z. (2009). Dasar-dasar manajemen bank syariah (Edisi revisi). Azkia Publisher.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2017). Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Edisi revisi). Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management information systems: Managing the digital firm (16th ed.). Pearson Education.
- Mulyadi. (2018). *Sistem akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2022). *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). Salemba Empat.
- Rudianto. (2018). *Pengantar akuntansi: Konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan*. Erlangga.
- Siagian, A. O., Ismail Alif, M., & Siboro, S. F. (2026). Modul pelatihan dan pengembangan: Peningkatan kapasitas Koperasi TPQ Darul Hikmah melalui harmonisasi manajemen profesional dan teknologi informasi syariah. Universitas Bina Sarana Informatika.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2020). *Accounting* (28th ed.). Cengage Learning.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2020). *Accounting principles* (14th ed.). John Wiley & Sons.